BAB III
PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI SEKITARNYA MENGHADAPI PEMILU 2004
(Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

A. Deskripsi Responden

Dari hasil kuesioner yang terkumpul, responden yang mengisinya terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah responden laki-laki lebih banyak daripada jumlah responden perempuan, seperti tersaji dalam tabel 1. Jumlah responden perempuan adalah 43 orang (36,44%) sedangkan responden laki-laki berjumlah 75 orang (63,56%). Perbedaan ini bukan merupakan kesengajaan, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, sampel dalam penelitian ini diambil secara acak.

Tabel 1: Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	Perempuan	43	36,44
2.	Laki-laki	75	63,56
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data primer

Selanjutnya, responden ini dibedakan dalam beberapa kelompok umur seperti

Tabel 2: Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

NO.	KELOMPOK UMUR	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	17 – 25	24	20,34
2.	26 – 40	67	56,78
3.	41 – 55	20	16,95
4.	56 – 70	7	5,93
	JUMLAH	118	100

Sumber: Data primer

tampak pada tabel 2. Berdasarkan data yang tersaji, tampak bahwa sebagian besar responden berusia di bawah 40 tahun yaitu sejumlah 91 orang (77,12%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif. Ini merupakan

(16,95%) berada pada kelompok usia 41-55 tahun, dan 7 responden sisanya (5,93) berusia di atas 55 tahun.

Usia produktif tersebut, didukung dengan tingkat pendidikan yang cukup baik dimana 37 orang responden (31,35%) telah menempuh pendidikan tinggi, apakah itu program diploma maupun jenjang kesarjanaan S1, seperti data yang ditampilkan pada tabel 3. Responden yang tingkat pendidikannya SD sebanyak 12 orang (10,17%), tamat SLTP 19 orang (16,10%) dan responden yang menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SLTA sebanyak 48 orang (40,68%). Hanya 2 orang responden (1,69%) yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bersekolah.

Tabel 3: Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	TIDAK SEKOLAH	2	1,69
2.	SD	12	10,17
3.	SLTP	19	16,10
4.	SLTA	48	40,68
5.	DIPLOMA	14	11,86
6.	SARJANA	23	19,49
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data primer

Dengan tingkat pendidikan yang cukup baik, maka diharapkan pengetahuan politik masyarakat Desa Tamantirto juga tidak terlalu buruk. Apalagi dengan bidang kerja yang sangat beragam, seperti ditampilkan pada tabel 4. Sangat bervariasinya jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa Desa Tamantirto mulai bergeser dari masyarakat rural dengan salah satu indikator homogenitas jenis pekerjaan masyarakatnya, menjadi masyarakat urban dengan heterogenitas jenis pekerjaannya. Perubahan ini salah satu penyebabnya adalah hubungan masyarakat Desa Tamantirto dengan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.[19] Dengan model pertanyaan terbuka, teridentifikasi berbagai jenis pekerjaan responden sebagai berikut:

19

Tabel 4: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO.	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	PNS	7	5,93
2.	PENSIUNAN	3	2,54
3.	SWASTA	13	11,02
4.	WIRASWASTA	42	35,59
5.	GURU	5	4,24
6.	PEDAGANG	7	5,93
7.	BURUH	6	5,08
8.	BIDAN	1	0,85
9.	PETANI	6	5,08
10.	PENGRAJIN	1	0,85
11.	IBU RUMAH TANGGA	7	5,93
12.	PENGACARA	1	0,85
13.	MAHASISWA	9	7,63
14.	PELAJAR	2	1,69
15.	LAIN-LAIN	3	2,54
16.	TIDAK BEKERJA	5	4,24
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data primer

B. Pendidikan Politik Responden

Lazimnya suatu pendidikan, selalu ada tiga dimensi yang hendak ditransformasikan, yakni kognisi (pengetahuan), afeksi (sikap dan evaluasi), dan psikomotorik (perilaku). Yang dimaksud kognisi adalah pengetahuan mengenai demokrasi, asal-usul, perkembangan teori-tori demokrasi, pemerintahan demokrasi, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud afeksi adalah sikap atau pandangan terhadap tindakan-tindakan demokratis, lembaga demokrasi, sistem demokrasi dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud psikomotorik adalah semua tindakan demokratis yang berhubungan dengan penyelenggaraan kekuasaan.

Kebebasan dalam demokrasi harus diiringi dengan kesabaran (*patience*), toleransi (*tolerance*) dan kemampuan mengendalikan diri (*self control*). Tanpa ketiga sifat itu kebebasan akan menjadi anarkhi. Dan ketiga sifat tersebutlah yang merupakan indikator penting untuk menilai pendidikan politik seseorang

Tabel-tabel di bawah ini akan menyajikan data bagaimana pendidikan politik yang dimiliki oleh responden dalam penelitian ini. Pembahasan data tersebut akan disusun ke dalam kemampuan kognisi, kemampuan afeksi dan kemampuan psikomotorik.

1. Kemampuan Kognisi Responden

Kemampuan kognisi responden diukur dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan responden tentang demokrasi.

Tabel 5: Pengetahuan Responden Tentang Kekuasaan Tertinggi Dalam Demokrasi Ada di Tangan Rakyat

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	55	46,61
2.	SETUJU	57	48,31
3.	TIDAK SETUJU	2	1,69
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	2	1,69
5.	TIDAK TAHU	2	1,69
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Demokrasi adalah pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pengertian ini ternyata telah dipahami oleh sebagian besar responden, karena seperti data yang tersaji dalam tabel 5 sebagian besar menjawab setuju yaitu 57 orang (48,31%) dan 55 orang (46,61%) menyatakan sangat setuju. Ini berarti sebagian besar masyarakat Desa Tamantirto telah memahami konsep dasar dari demokrasi, bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dan pemerintah adalah pemegang mandat dari kekuasaan tersebut sehingga apapun yang dilakukan pemerintah, seharusnya hanya untuk kepentingan rakyat.

Meskipun demikian ada seorang responden yang mengatakan bahwa kalau rakyat

besar rakyat Indonesia masih bodoh, sehingga biar saja masalah negara ditangani oleh orang yang pintar-pintar.[20]

Meskipun sebagian besar telah memahami hal ini, data juga menunjukkan ada sebagian masyarakat Desa Tamantirto yang belum mengerti tentang masalah kekuasaaan dalam demokrasi. Terbukti ada 2 orang responden (1,69%) yang menjawab tidak setuju dan 2 orang (1,69%) yang menjawab sangat tidak setuju.

Tetapi yang menarik adalah pendapat seorang responden yang berprofesi sebagai mahasiswa yang mengatakan bahwa kekuasaan di tangan rakyat ini masih bersifat semu karena rakyat hanya "berkuasa" pada saat pemilu. Setelah mereka memilih wakil-wakilnya di legislatif, rakyat tidak lagi memilki kekuatan untuk mengontrol wakil-wakilnya tersebut agar tindakan mereka selalu bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak.[21]

Masih berkaitan dengan pengetahuan responden tentang demokrasi, ditanyakan pendapat mereka tentang persamaan hak dalam demokrasi. Dan jawaban mereka tersaji dalam data yang terdapat dalam tabel 6.

Dari data tersebut tampak bahwa sebagian besar responden yaitu 108 orang (91,52%) telah memiliki pengetahuan tentang persamaan hak dalam demokrasi karena mereka menjawab sangat setuju 34 orang (28,81%) dan 74 orang (62,71%) menjawab setuju. Sedangkan 5 orang (4,24) responden menjawab tidak setuju.

Tabel 6: Pengetahuan Responden Tentang Persamaan Hak Dalam Demokrasi

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	34	28,81
2.	SETUJU	74	62,71
3.	TIDAK SETUJU	5	4,24
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	-	
5.	TIDAK TAHU	5	4,24
	JUMLAH	118	100,00

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Sarmin, tanggal 26 Juli 2004 di Desa Tamantirto.
[21] Hasil wawancara dengan [illegible]

Sumber: Data Primer

Tetapi, menurut responden, sama seperti pada masalah kekuasaan, persamaan hak inipun belum terlaksana secara optimal di Indonesia. Persamaan hak ini hanya bis dirasakan pada saat pencoblosan pemilu dimana setiap orang punya hak yang sma untuk menentukan pilihan mereka. Tetapi di luar itu, hampir tidak pernah ditemui persamaan hak antara seluruh rakyat Indonesia, di sektor kehidupan apapun.[22]

Dimensi aspek kognisi yang lain adalah pengetahuan tentang pemerintahan dan sistem pemerintahan. Untuk mengetahui pemahaman responden tentang hal tersebut ditanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah pengetahuan responden tentang sistem pemilu. Sistem pemilu 2004 berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2004, pemilih disamping memilih partai juga memilih nama calon legislatif yang tertera di dalam kartu suara, dan ini tidak dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sebelumnya pemilih hanya memilih tanda gambar. Perubahan ini diharapkan akan membuat konstituen bisa lebih mengenal wakil-wakil mereka di legislatif. Perbedaan yang lain adalah pada cara pemilihan presiden. Pertama kali dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, rakyat akan memilih langsung presiden Republik Indonesia dari sekian kandidat presiden yang ada.

Tabel 7: Pengetahuan Responden Tentang Perbedaan Sistem Pemilu 2004 Dengan Sistem Pemilu Sebelumnya

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	33	27,97
2.	SETUJU	76	64,41
3.	TIDAK SETUJU	7	5,93
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	-	-
5.	TIDAK TAHU	2	1,69
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

[22] Hasil wawancara dan [illegible]

Ketika hal ini ditanyakan kepada responden, dari jawaban yang tersaji dalam tabel 7, terlihat bahwa sebagian besar responden telah memahami perbedaan sistem pemilu 2004 dengan sistem pemilu sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan jawaban sangat setuju yang dipilih oleh 33 orang (27,97%) dan 76 orang lainnya (64,41%) menyatakan setuju. Sementara 7 orang responden (5,93%) menyatakan tidak setuju bahwa sistem pemilu 2004 berbeda dengan sistem pemilu seblumnya, dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang sistem pemilu.

Seorang responden mengatakan sistem pemilu 2004 memberikan harapan baru dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat.[23] Meskipun demikian, sebagian besar responden tampaknya sepakat bahwa sistem pemilu 2004 lebih sulit daripada sebelumnya. Pendapat ini terdistribusi dalam jawaban-jawaban pada tabel 8 dimana 94 orang (79,66%) menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa sistem pemilu 2004 lebih sulit.

Kesulitan di sini lebih bersifat teknis, karena kertas suara yang sangat besar dengan nama-nama calon legislatif yang sangat banyak. Sehingga bingung harus memilih yang mana, karena pada kenyataannya pemilih tidak mengenal dengan baik calon-calon legislatif tersebut.[24] Bahkan di beberapa daerah pemilihan, ada dua lembar kertas suara dan hal ini tidak disosialisasikan jauh-jauh hari sehingga menambah kebingungan pemilih yang mengakibatkan tingginya jumlah suara tidak sah dalam pemilihan 2004 karena banyak kertas suara yang dianggap rusak akibat dicoblos tembus oleh pemilih.[25]

---

[23] Hasil wawancara dengan Mbak Yetti Wulandari, tanggal 26 Juli 2004 di Gonjen Lor, Desa Tamantirto.

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Sarmin, tanggal 26 Juli 2004 di Desa Tamantirto

[25] [illegible]

Pertanyaan lain yang diajukan kepada responden adalah pengetahuan tentang hasil perolehan suara dalam pemilu. Partai pengumpul suara terbanyak pada posisi 4 secara nasional adalah PPP. Untuk mengetahui pemahaman responden tentang hasil pemilu, ditanyakan apakah Partai Demokrat menduduki yang menduduki posisi tersebut. jawaban responden tersaji dalam data di tabel 9.

Dari tampilan data pada tabel 9 tampak bahwa pengetahuan responden tentang hasil pemilu berimbang antara yang tahu, dengan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju, dan responden yang tidak tahu, dengan jawaban sangat setuju dan setuju. Secara lebih rinci jawaban responden terdistribusi sebagai berikut: 2 orang (1,69%) menjawab

Tabel 9: Pengetahuan Responden Tentang Hasil Pemilu 2004

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	2	1,69
2.	SETUJU	46	38,98
3.	TIDAK SETUJU	51	43,22
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	13	11,02
5.	TIDAK TAHU	6	5,08
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

sangat setuju. 46 orang (38,98) menjawab setuju. 51 orang (43,22%) menjawab tidak setuju. 13 orang (11,02%) menjawab sangat tidak setuju dan 6 orang sisanya (5,08%) menjawab tidak tahu.

Pertanyaan selanjutnya untuk mengetahui tingkat kognisi responden adalah pertanyaan tentang GBHN. Mulai tahun 2004, Indonesia tidak lagi memiliki GBHN, ketika hal ini ditanyakan kepada responden, jawaban mereka bervariasi yang menunjukkan tingkat pengetahuan mereka, seperti tersaji pada tabel 10.

Dari data tersebut terlihat bahwa hanya 17 orang responden (22,88%) yang

Tabel 10: Pengetahuan Responden Tentang GBHN

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	5	5,08
2.	SETUJU	12	17,80
3.	TIDAK SETUJU	49	55,93
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	47	11,02
5.	TIDAK TAHU	5	10,17
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

79 orang responden (66,95%) tidak mengetahui hal ini, terbukti mereka tidak menyetujui pernyataan tersebut. sementara sisanya sebanyak 12 orang (10,17%) menjawab tidak tahu.

Dari data yang tersaji pada tabel 5 sampai dengan tabel 10, untuk kemampuan kognisi dari responden, tampaknya ada balance antara jumlah responden yang memiliki pengetahuan dengan responden yang belum memiliki pemahaman walaupun dengan prosentase yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Tamantirto tidak buta sama tentang masalah politik, hanya perlu meningkatan pengetahuan mereka.

2. Kemampuan Afeksi Responden

Pendidikan politik tidak hanya bertujuan membangun dan mengembangkan pengetahuan politik tertentu, seperti sistem pemilu, sistem kepartaian, demokrasi, melainkan juga bertujuan membentuk dan mengembangkan orientasi-orientasi, yang meliputi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, arah dan perasaan politik. Nilai-nilai merupakan parameter yang bermanfaat untuk kontrol atau pengendalian sehingga dikenallah etika politik atau *fatsoen* (tata krama).

Untuk mengetahui tingkat pemahaman afeksi responden diajukan beberapa

Tabel 11: Pendapat Responden Tentang Politik Uang Dalam Pemilu

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	6	5,08
2.	SETUJU	13	11,02
3.	TIDAK SETUJU	51	43,22
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	48	40,68
5.	TIDAK TAHU	-	-
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Pemilu yang fair dan jujur merupakan salah satu syarat bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Adanya politik uang (money politic) merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tujuan ini. Ketika ditanyakan kepada responden pendapat mereka tentang politik uang, jawaban responden bervariasi, seperti tampak pada tampilan data pada tabel 11. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa sebagian besar responden 99 orang (83,90%) menyatakan ketidaksetujuan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran responden akan pemilu yang jujur tanpa dikotori oleh politik uang sudah terbangun dengan baik.

Seorang responden mengatakan, seorang calon legislatif yang membagikan amplop menjelang hari pemilihan, bila nanti dia terpilih, yang pertama kalim ada dalam pikirannya pasti bagaimana cara dia mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan agar dapat terpilih. Wakil rakyat seperti ini tidak mungkin akan memikirkan kepentingan rakyat. Dia pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Jadi lebih baik jangan dipilih.[26]

Selanjutnya ditanyakan pula orientasi politik para responden, dengan menanyakan apakah mereka memilih partai politik peserta pemilu karena janji-janji mereka. Dan dari jawaban responden seperti yang tersaji pada tabel 12, tampak bahwa orientasi politik responden penelitian ini tidak lagi semata-mata hanya loyalitas sesaat terhadap salah satu

[26] Hasil wawancara [illegible]

partai politik. Data dalam tabel 12 menunjukkan bahwa 68 orang (57,63%) menjawab tidak setuju dan 24 orang (20,34%) menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 12: Alasan Responden Memilih Partai Karena Janji-Janji

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	6	5,08
2.	SETUJU	20	16,95
3.	TIDAK SETUJU	68	57,63
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	24	20,34
5.	TIDAK TAHU	-	-
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Seorang responden mengatakan bahwa dia sudah mengikuti pemilu sejak tahun 1971, dan dia memilih partai politik yang sama sampai pemilu 2004. Meskipun dari pengamatannya partai politik yang dipilihnya sering tidak berpihak kepada rakyat, tetapi ada loyalitas yang mendalam kepada partai politik tersebut, apalagi sebagai seorang muslim, tentu saja dia merasa harus memilih partai politik yang berazaskan Islam.[27]

Dari pernyataan tersebut, tampaknya ada loyalitas buta di kalangan masyarakat Desa Tamantirto terhadap partai-partai politik tertentu. Karena meskipun mengakui sering kecewa dengan sikap partai pilihannya, para pemilih ternyata tetap memilih partai tersebut dengan alasan-alasan lain, seperti sentimen agama misalnya. Ini juga menunjukkan bahwa politik aliran, ternyata masih ada dalam konteks perpolitikan di Indonesia.

Tabel 13: Pendapat Responden Tentang Presiden Dari Kalangan Militer

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	8	5,78
2.	SETUJU	31	26,27
3.	TIDAK SETUJU	63	53,39
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	9	7,63
5.	TIDAK TAHU	7	5,93
	JUMLAH		

Pertanyaan selanjutnya ditujukan dengan harapan untuk mengetahui persepsi responden tentang presiden dari kalangan militer. Seperti diketahui, penolakan terhadap pimpinan dari kalangan militer begitu luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian di Desa Tamantirto menunjukkan bahwa persepsi ini ternyata juga dimilikimoleh sebagian responden, terbukti dari tampilan data pada tabel 13 yang merupakan jawaban dari para responden, 63 orang (53,39%) menyatakan tidak setuju dan 9 orang (7,63%) menyatakan sangat tidak setuju. Sementara 8 orang (6,78%) menyatakann sangat setuju dan 31 orang (26,27%) menjawab setuju. Sedangkan 7 orang (5,93%) menjawab tidak tahu.

Yang menarik adalah argumen dari masing-masing kelompok. Kelompok yang setuju beranggapan bahwa kondisi Indonesia sekarang sudah sangat parah, kerusuhan dimana-mana. Dibutuhkan kekuatan untuk bisa mengatasi hal ini dan mengembalikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Dan yang memiliki akses untuk melakukan hal ini adalah militer. Seorang presiden dari kalangan militer akan memiliki nilai lebih di mata kelompok militer dan ini akan berdampak positif bagi pemerintahannya.[28]

Sedangkan yang tidak setuju mengatakan bahwa pemerintahan militer akan membawa Indonesia kembali ke mas Orde Baru yang sangat represif. Demokrasi yang mulai bergulir sejak reformasi 1999 akan tersendat, karena kalangan militer "alergi" terhadap perbedaan pendapat.[29]

Dari uraian di atas, tampak bahwa kemampuan afeksi masyarakat Desa Tamantirto sudah terbentuk, terlihat dari sikap mereka terhadap pelaksanaan sistem politik. Hanya adanya biasa politik aliran masih sangat mewarnai sikap dan persepsi politik mereka.

---

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Ribut Waldani, tanggal 27 Juli 2004 di Dusun Ngebel Desa Tamantirto.
[28] Hasil wawancara dengan Mas Fathur, tanggal 27 Juli 2004 di Dusun Rukeman Desa Tamantirto
[29] [illegible]

3. Kemampuan Psikomotorik Responden

Kemampuan psikomotorik ini diukur dari pengetahuan rakyat tentang sikap dan tingkah laku berdemokrasi, seperti toleransi; berbeda pendapat dan pandangan, menahan emosi, memperlakukan minoritas, menghargai kesetaraan gender dan sebagainya.

Untuk mengetahuinya diajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya tersaji dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 14: Pendapat Responden Tentang Pengusiran Massa Partai Lain

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	72	61,02
2.	SETUJU	34	28,81
3.	TIDAK SETUJU	2	1,69
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	9	7,63
5.	TIDAK TAHU	1	0,85
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Sikap membiarkan massa partai politik lain masuk ke dalam wilayahnya adalah salah satu bentuk sikap toleransi terhadap perbedaan. Untuk mengetahui pendapat responden tentang hal ini, diminta pendapat mereka tentang pengusiran massa partai lain yang berada di wilayah kampanye partainya. Jawaban mereka tersaji dalam tabel 14. Dari data tersebut 72 orang (61,02%) menyatakan sangat setuju, 34 orang responden (28,81) menyatakan setuju. Responden yang menyatakan ketidak setujuan mereka hanya 11 orang (9,32%). Ini menunjukkan bahwa sikap toleransi warga Desa Tamantirto masih sangat kurang. Alasan mereka, massa partai politik lain yang masuk ke wilayah kampanye partainya, berati tidak menghormati jadual kampanye partai yang bersangkutan.[30]

Kurangnya toleransi terhadap partai lain ternyata tidak terjadi pada kehidupan bermasyarakat masyarakat Desa Tamantirto, paling tidak para responden penelitian ini.

yang berada di sekitar mereka, seperti tercermin pada data dalam tabel 15 tentang bagaimana masyarakat memperhatikan kepentingan golongan minoritas, misalnya Cina.

Tabel 15: Pendapat Responden Tentang Perhatian Terhadap Kepentingan Kelompok Minoritas

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	36	30,51
2.	SETUJU	70	59,32
3.	TIDAK SETUJU	8	6,78
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	4	3,39
5.	TIDAK TAHU	-	-
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Dari data tersebut tampak bahwa mayoritas berpendapat bahwa kelompok minoritas juga perlu diperhatikan. 36 orang responden (30,51%) menyatakan sangat setuju, dan 70 orang (59,32%) menjawab setuju. Hanya 12 orang (10,17%) yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Hubungan manusia dengan manusia adalah masalah dunia. Sedangkan keyakinan atau agam adalah masalah manusia dengan pencipta. Tetangga adalah sudara yang terdekat karena bila ada kesulitan kita pertama kali akan meminta bantuan mereka, karena itu berhubungan baik dengan tetangga adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Demikian dikatakan oleh seorang responden.[31]

Yang menggembirakan adalah perspektif gender yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tamantirto yang tercermin dari jawaban-jawaban responden seperti tersaji pada tabel 16. Sebagian besar responden tampaknya sudah memiliki perspektif gender. Ini terbukti dari jawaban mereka yang mendukung keterlibatan perempuan di bidang politik dengan menjadi anggota legislatif. 22 orang (18,64%) menyatakan sangat setuju. 88 rang (74,58%) menjawab setuju dan 8 orang sisanya (7,78%) menyatakan tidak setuju.

---

[30] Hasil wawancara dengan Mas Erwin Wijayanto, tanggal 27 Juli 2004 di Dusun Nulis Desa Tamantirto

[31] Hasil wawancara dengan Mas [illegible]

Tabel 15: Pendapat Responden Tentang Keterlibatan Perempuan Di Politik

NO.	JAWABAN RESPONDEN	FREKUENSI	PROSENTASE
1.	SANGAT SETUJU	22	18,64
2.	SETUJU	88	74,58
3.	TIDAK SETUJU	8	7,78
4.	SANGAT TIDAK SETUJU	-	-
5.	TIDAK TAHU	-	-
	JUMLAH	118	100,00

Sumber: Data Primer

Dari analisis terhadap tabel 14 sampai dengan tabel 16, menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik responden cukup baik, hanya pada dimensi toleransi terhadap lawan politik -- karena terbukti masyarakat bisa menerima perbedaan di bidang lain – perlu mendapatkan advokasi tentang kemajemukan dan perbedaan pandangan dan persepsi politik.

C. Peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Desa Tamantirto

Dalam rangka mewujudkan harapan menjadi universitas unggulan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan memberikan pencerahan, adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terdekat, yaitu masyarakat Desa Tamantirto, dengan melaksanakan berbagai kegiatan.

Berkaitan dengan pendidikan politik warga Desa Tamantirto, sebagai lembaga dengan sumberdaya manusia terdidik dan sumberdara yang memadai, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seharusnya mampu berperan aktif dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat Desa Tamantirto.

Penelitian ini berusaha menggali bagaimaan peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam persepsi masyarakat Desa Tamantirto sehubungan dengan peningkatab pendidikan politik

Pendapat masyarakat Desa Tamantirto tentang peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat Desa Tamantirto menjelang pemilu 2004, yang diwakili oleh 118 responden tersaji dalam tabel 17.

Tabel 17: Pendapat Responden Tentang Peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

NO.	KEGIATAN UMY	PENDAPAT RESPONDEN									
		Sangat setuju		Setuju		Tidak setuju		Sangat tidak setuju		Tidak tahu	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Memberikan penyuluhan politik	7	5,93	28	23,73	60	50,85	13	11,02	10	8,47
2.	Memberikan sosialisasi sistem pemilu	5	4,24	35	29,66	57	48,31	11	9,32	10	8,47
3.	Memberikan sosialisasi cara pencoblosan pemilu	2	1,69	34	28,81	60	50,85	12	10,17	10	8,47
4.	Membantu warga meningkatkan pengetahuan politik mereka	5	4,24	40	33,90	55	46,61	9	7,63	9	7,63
5.	Melakukan pengabdian masyarakat berkaitan dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat	4	3,39	53	44,92	42	35,59	6	5,08	13	11,02

Sumber: Data Primer

Kalau kita cermati data yang tersaji pada tabel 17, kita akan melihat bahwa pendapat responden bervariasi tentang keterlibatan atau peran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam meningkatkan pendidikan politik warga Desa Tamantirto menghadapi pemilu 2004. Tetapi ada satu hal yang perlu dicermati, ada pendapat yang sama di kalangan responden yang bisa menjadi bahan instrospeksi diri bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara institusional masih sangat kurang kiprahnya dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, dalam banyak bidang terutama dalam hal pembelajaran politik.

Bapak Ciptadi seorang responden yang juga seorang purnawirawan ABRI, mengatakan:

> "Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu hebat, megah, gedungnya bagus. Kami yang warga dusun sampai nggak bosen-bosen lihatnya. Sayangnya

masyarakat tidak bisa mempergunakan. Lalu tidak pernah ada penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat."[32]

Pendapat ini didukung oleh Bapak Surwandono, SIP,MSI, mantan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengatakan bahwa secara resmi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memang belum pernah mengadakan pengabdian masyarakat di wilayah Desa Tamantirto.[33]

Dari wawancara mendalam dengan beberapa responden, diketahui bahwa meskipun secara institusional tidak ada kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi secara informal, para mahasiswa dan dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berdomisili di Desa Tamantirto, dalam interaksi mereka dengan warga Desa Tamantirto ternyata membawa pengaruh positif. Dalam bincang-bincang atau pergaulan sehari-hari, para mahasiswa "menularkan" pengetahuan politik kepada warga masyarakat.[34] Di samping itu, mahasiswa dan dosen-dosen tersebut sering dijadikan tempat bertanya bila masyarakat menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkannya. Masalah-masalah seputar pemilu adalah hal-hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu 2004.[35]

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara institusional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum banyak berperan, tetapi secara tidak langsung, kehadiran mahasiswa-mahasiswa dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Desa Tamantirto menjadi agen penghubung antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan masyarakat Desa Tamantirto. Tapi tentu saja hubungan informal ini perlu ditingkatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat

---

[32] Hasil wawancara dengan Bapak Ciptadi, tanggal 27 Juli 2004 di Dusun Nulis Desa Tamantirto

[33] Hasil wawancara dengan Bapak Surwandono,SIP, MSI, tanggal 2 Agustus 2004 di Ruang pengajaran, FISIPOL-UMY

[34] Hasil wawancara dengan Ibu Riyanti, tanggal 27 Juli 2004 di Dusun Nulis Desa Tamantirto

[35]

institusional. Sehingga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi